

PERUBAHAN PARADIGMA PERTAHANAN INDONESIA DARI PERTAHANAN TERITORIAL MENJADI PERTAHANAN MARITIM: SEBUAH USULAN

INDONESIA'S PARADIGM CHANGE FROM TERRITORIAL DEFENSE TO MARITIME DEFENSE: A PROPOSAL

Jerry Indrawan¹

Universitas Paramadina
(jerry.indrawan@paramadina.ac.id)

Abstrak – Membangun sebuah sistem pertahanan nasional yang kuat, paling tidak membutuhkan pertimbangan pada empat hal berikut: faktor geografis negara yang bersangkutan, sumber daya nasional sebuah negara, analisis terhadap kemungkinan ancaman yang akan muncul, dan perkembangan teknologi informasi. Selama ini, orientasi sektor pertahanan Indonesia lebih condong berperspektif ke darat, sekalipun wilayah laut kita jauh lebih luas. Dengan menggunakan paradigma darat, maka doktrin yang digunakan untuk pertahanan adalah Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta). Doktrin ini mensyaratkan peranan penting rakyat dengan tentara profesional sebagai inti kekuatan pertahanan. Dalam rangka pelaksanaan doktrin Sishanta inilah diperlukan aparat teritorial untuk mempersiapkan wilayah-wilayah Indonesia, untuk berperang dengan kekuatan gabungan rakyat dan tentara pada saat datangnya musuh. Wilayah Indonesia dibagi ke dalam wilayah-wilayah teritorial (Kodam). Indonesia sebagai negara maritim harusnya memiliki perspektif kelautan dalam pelaksanaan pertahanan nasionalnya. Faktor geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan membuat *continental based defense*, dengan berfokus pada kekuatan Angkatan Darat menjadi tidak relevan. Indonesia sudah seharusnya menggunakan paradigma pertahanan kepulauan berdasarkan doktrin *maritime based defense*. Doktrin ini menekankan pada Angkatan Laut yang kuat dengan dukungan Angkatan Udara yang kuat juga. *Maritime based defense* harus mengkolaborasikan kekuatan Angkatan Laut dengan Angkatan Udara karena faktor geografis negara kepulauan membutuhkan respons cepat yang tidak mungkin dilakukan lewat darat. Ancaman non-konvensional yang muncul dewasa ini membuat spektrum pertahanan sebuah negara tidak bisa lagi parsial, apalagi ancaman yang muncul dari sektor kelautan pun semakin beragam. Tulisan ini akan menanggapi potensi ancaman non-konvensional yang muncul dengan menawarkan perubahan paradigma pertahanan dari koter ke pertahanan maritim. Argumen-argumen yang disajikan di dalam artikel ini akan mencoba membahas perubahan paradigma tersebut.

Kata kunci: sistem pertahanan, komando teritorial (koter), pertahanan maritim, dan kekuatan maritim

¹ Penulis adalah Pengamat Militer dan Pertahanan dari Universitas Paramadina, serta penulis buku Studi Strategi dan Keamanan. Alumni Program Studi *Peace and Conflict Resolution Cohort I* Universitas Pertahanan Indonesia. Saat ini aktif mengajar di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina dan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

Abstract - To build a strong national defense system, at least we require four things to considerate: geographical factor, national resources, analysis of possible emerging threats, and the development of information technology. During this time, Indonesia's defense perspective is more to the mainland, than to the sea. By using mainland paradigm, then the doctrine used is the Total Defense System (Sishanta). Such doctrine requires an important role of people, alongside professional army, as the core of defense force. In order to implement the Sishanta doctrine, territorial authorities is needed to prepare territories all around Indonesia to fight with the combined power of the people and the armed forces, upon the arrival of the enemy. Indonesian territory is divided into territorial areas (Kodam). Indonesia, as a maritime country, should have a maritime perspective in the implementation of its national defense. Indonesia's geographical factor made continental based defense, focusing on the strength of the Army, becomes irrelevant. It is time for Indonesia to use maritime based defense. This doctrine emphasizes a strong navy with the support of a strong air force as well. Maritime based defense should collaborate Naval power with Air power because of Indonesian geographical factors requires a quick response that can not be done by ground. Non-conventional threats that arise today makes a country defense spectrum can no longer be partial, let alone threats arising from the maritime sector are even more diverse. This paper will respond to the potential of non-conventional threats by offering a paradigm change from territorial defense to maritime defense. The arguments presented in this article will discuss this paradigm changes.

Keywords: defense system, territorial command (koter), maritime defense, dan maritime power

Pendahuluan

Pertahanan nasional adalah tindakan untuk melenyapkan semua ancaman musuh dari luar negeri, dalam bentuk dan wujud apa pun, yang mengancam dan membahayakan kedaulatan, keselamatan, dan eksistensi bangsa dan negara. Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.²

Pertahanan negara juga merupakan salah satu elemen pokok suatu negara karena menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negara, wilayah, dan sistem politiknya dari ancaman negara lain. Hal ini sejalan dengan pendapat KJ Holsti dimana pertahanan

² Jerry Indrawan, "Kepemimpinan Berbasis Pemberdayaan dalam Alih Teknologi: Sebuah Upaya Meningkatkan Kualitas SDM Pertahanan Indonesia", *Jurnal Pertahanan*, Vol. 5, No. 1, 2015, hlm. 67.

adalah kepentingan nasional yang dinilai sebagai *core value* atau sesuatu yang dianggap paling vital bagi negara dan menyangkut eksistensi suatu negara.³

Kebijakan pertahanan suatu negara seharusnya sudah ada dalam cetak biru (*blue print*) yang merupakan strategi besar pertahanan. Strategi besar pertahanan ini adalah kebijakan politik yang dihasilkan dua lembaga, yaitu presiden dan parlemen. Strategi besar pertahanan ini pada prinsipnya adalah pondasi dan peletak dasar dari prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks pertahanan di Indonesia.⁴

Agus Widjojo mengemukakan bahwa dalam pendekatan konseptual untuk menyusun suatu konsepsi pertahanan negara, kita tidak mungkin terlepas dari kecenderungan perkembangan lingkungan strategis, ciri konflik masa depan, hakikat ancaman dari luar negeri dan dalam negeri, serta kepentingan nasional Indonesia. Dari informasi yang didapatkan untuk menjawab semua kecenderungan itu, selanjutnya kita menentukan strategi nasional guna mencapai kepentingan nasional, khususnya untuk mendapatkan penjabaran strategi dan sasaran dalam bidang pertahanan negara.⁵

Menurut penulis, membangun sebuah sistem pertahanan nasional yang kuat, paling tidak membutuhkan pertimbangan pada empat hal berikut: faktor geografis negara yang bersangkutan, sumber daya nasional sebuah negara, analisis terhadap kemungkinan ancaman yang akan muncul, dan perkembangan teknologi informasi. Di luar ini tentu saja masih ada konsideran lainnya untuk bagaimana merumuskan sebuah sistem pertahanan nasional yang efektif dan efisien.

Kita harus merancang sebuah *grand design* kebijakan pertahanan yang tidak lagi berorientasi pada darat (teritori). Strategi besar pertahanan kita sekarang harus diarahkan ke arah laut. Ancaman yang ada pun kebanyakan berhubungan dengan laut. Untuk menjawab persoalan ini, penulis akan mencoba menganalisa bagaimana faktor geografis sangat berpengaruh pada paradigma pertahanan kita. Jika selama ini berbentuk teritorial, maka jika merujuk pada kondisi alam, paradigma pertahanan maritimlah yang

³ Kalevi J. Holsti, *International Politics: A Framework of Analysis*, (New Delhi: Prentice Hall, 1981), hlm. 200.

⁴ Muradi, *Dinamika Politik Pertahanan dan Keamanan di Indonesia: Memahami Masalah dan Kebijakan Politik Pertahanan dan Keamanan Era Reformasi*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2012), hlm. 29.

⁵ Agus Widjojo, "Wawasan Masa Depan tentang Sistem Pertahanan Keamanan Negara", dalam Indria Samego (ed), *Sistem Pertahanan-Keamanan Negara: Analisis Potensi dan Problem*, (Jakarta: The Habibie Center, 2001), hlm. 44.

lebih sesuai. Tulisan ini akan menanggapi potensi ancaman non-konvensional yang muncul dengan menawarkan perubahan paradigma pertahanan dari koter ke pertahanan maritim. Argumen-argumen yang disajikan di dalam artikel ini akan mencoba membahas perubahan paradigma tersebut.

Pertahanan Teritorial

Pertahanan territorial di Indonesia lebih dikenal dengan istilah komando Teritorial (Koter). Lamuncul dari doktrin pertahanan kita yang disebut Sishanta (Sistem Pertahanan Semesta) sesuai dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sishanta pada era revolusi kemerdekaan lebih dikenal dengan istilah Sishankamrata (Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta). Sishanta adalah sebuah konsep pertahanan negara yang berdasarkan pada strategi Perang Semesta (*Total War*) di dalam wilayah sendiri. Dalam konteks ini, berdasarkan aturan pertahanan yang ada di Indonesia, strategi pertahanan yang ideal adalah strategi teritorial.⁶ Paradigma ini yang akhirnya memunculkan istilah koter.

Doktrin ini merupakan doktrin pertahanan yang diwarisi dan dikembangkan dari pengalaman pada perang kemerdekaan. Almarhum Jenderal Besar A.H. Nasution menegaskan bahwa perang rakyat semesta adalah alternatif yang tidak bisa dihindari oleh negara miskin yang bertempur melawan tentara negara kaya yang berperang dengan dasar doktrin perang konvensional.⁷

Perang rakyat semesta mensyaratkan peranan penting rakyat dengan tentara profesional sebagai inti kekuatan pertahanan. Dalam rangka pelaksanaan doktrin Sishanta inilah diperlukannya aparat teritorial untuk mempersiapkan wilayah-wilayah Indonesia, untuk berperang dengan kekuatan gabungan rakyat dan tentara pada saat datangnya musuh. Wilayah Indonesia dibagi ke dalam wilayah-wilayah teritorial (Kodam) yang masing-masing dipimpin oleh seorang panglima atau komandan. Tugas kodam adalah mempersiapkan wilayah masing-masing untuk melakukan perang rakyat semesta

⁶ Beni Sukadis dan Eric Hendra (ed.), *Total Defense and Military Conscript: Indonesia's Experience and Other Democracies*, (Jakarta: Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, 2008), hlm. 27.

⁷ Salim Said, *Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini dan Kelak*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm. 309.

pada saat negara diserang oleh kekuatan luar.⁸ Sistem koter bukanlah sistem pertahanan untuk melakukan pertempuran secara ofensif, namun merupakan sistem untuk bertahan dari serangan musuh yang telah masuk ke wilayah Indonesia.⁹

Salim Said berpendapat, semua kegiatan militer sifatnya adalah gabungan. Wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam dua atau tiga wilayah pertahanan (Wilhan) yang masing-masing dipimpin oleh seorang Panglima. Wilhan ini adalah kompartemen strategis yang sifatnya gabungan. Dengan adanya Wilhan, maka dengan sendirinya Koter akan terhapuskan. Ada pun pembinaan wilayah dalam rangka mempersiapkan ruang juang, alat juang, dan sarana juang, selanjutnya menjadi tugas Kementerian Pertahanan bekerja sama dengan pemda setempat. Penggunaan TNI dalam pembinaan wilayah seluruhnya tergantung pada keputusan dua instansi ini.¹⁰

Koter dilihat oleh para pengkritiknya sebagai alat politik tentara untuk melaksanakan program politik militer. Tapi persoalannya apakah koter itu pernah tidak menjadi alat politik? Sejarah koter tidak bisa dipisahkan dari perang gerilya yang kita alami di zaman revolusi dulu, serta perang anti-gerilya yang dilakukan TNI terhadap DI/TII serta sisa-sisa pemberontak PRRI/Permesta. Pengalaman Indonesia dan dunia menunjukkan bahwa perang gerilya tidak pernah bebas politik. Ideologi dan politik koter di zaman menjelang hingga zaman Demokrasi Terpimpin adalah mencegah Indonesia jatuh ke tangan komunis.¹¹

Sementara itu, politik dan ideologi koter di zaman Orde Baru adalah untuk memperpanjang dan mempertahankan kekuasaan penguasa Orba. Aparat teritorial pada masa Orba digunakan atau disalahgunakan untuk tujuan-tujuan politik penguasa dengan mengangkat Panglima Kodam (Pangdam) menjadi aparat pelaksana Kopkamtib dari pembina Golkar. Aparat teritorial menjadi alat untuk menggiring dan mengontrol rakyat bagi suksesnya program politik dan ekonomi penguasa.¹² Selain faktor sejarah, faktor

⁸ *Ibid.*, hlm. 309-310.

⁹ Yahya A. Muhaimin, *Bambu Runcing dan Mesiu: Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 46.

¹⁰ Said, *op cit.*, hlm. 306-307.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 313-314.

¹² *Ibid.*, hlm. 310.

sosio-kultural di dalam masyarakat Indonesia yang peternalistik, yang secara umum dipengaruhi nilai-nilai budaya Jawa yang menekankan pada tingkah laku yang pantas.¹³

Sayangnya, pemerintah dan TNI sampai saat ini masih memandang strategi teritorial seperti ini harus terus dipertahankan karena terbukti berjasa mengusir penjajah Belanda di zaman Bung Karno. Namun sesudah itu, tentara Indonesia tidak pernah lagi menghadapi agresi tentara asing, kecuali pergolakan separatis dalam negeri. Selain itu, struktur koter memiliki kecenderungan hanya fokus kepada satu matra saja, yaitu Angkatan Darat, mengakibatkan adanya ketidakseimbangan kekuatan postur pertahanan kita. Pemerintah tidak menanggapi potensi ancaman non-konvensional yang muncul, seperti terorisme, konflik horisontal, dan kejahatan transnasional.¹⁴

Lingkup pertahanan dan keamanan juga bukan hanya terbatas pada substansi kewilayahan (*territorial security*), tetapi juga menjadi isu spesifik. Muncul istilah-istilah yang lebih khusus, seperti keamanan energi, keamanan lingkungan, keamanan ekonomi, dan istilah-istilah lain yang kelak di kemudian hari menjadi semakin luas. Isu-isu non-militer pun berkembang menjadi masalah yang berkaitan dengan peran dan tugas militer (sekuritisasi).¹⁵ Menanggapi masalah-masalah yang berhubungan dengan sekuritisasi di Indonesia, sudah sepantasnyalah spektrum pertahanan kita harus disesuaikan juga dengan problem itu.

Wilayah Geografis Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara maritim pernah mengalami masa kejayaan di era kerajaan Sriwijaya pada abad ke-8 dan Majapahit abad ke-15. Pada masa itu, Indonesia atau dulu disebut Nusantara, terkenal ke berbagai kawasan. Sriwijaya bahkan berkembang menjadi pusat perdagangan kawasan Asia Tenggara yang dikunjungi pedagang Tiongkok dan India. Itu terjadi karena Sriwijaya memiliki armada laut yang tangguh yang mampu mengusir para perompak, sehingga menimbulkan rasa aman bagi para pedagang yang berkunjung. Begitu juga kerajaan Majapahit yang memiliki wilayah

¹³ Muhaimin, *op cit.*, hlm. 43.

¹⁴ Sukadis, *op cit.*, hlm. 28.

¹⁵ Kusnanto Anggoro, "Paradigma Keamanan Nasional dan Pertahanan Negara di Negara Demokrasi", dalam Rusdi Marpaung, dkk (ed.), *Dinamika Reformasi Sektor Keamanan*, (Jakarta: Imparsial, 2005), hlm. 5-6.

kekuasaan luas mencakup beberapa wilayah di Asia Tenggara, bahkan sampai Madagaskar di tenggara Afrika, memiliki armada laut yang kuat.¹⁶

Kedua kerajaan besar ini memahami posisi mereka sebagai wilayah maritim sehingga kerajaan itu memberikan perhatian besar terhadap pengembangan kekuatan dan ketahanan negara di laut. Indonesia jika ditinjau dari bentuk wilayah negara, adalah sebuah negara dengan bentuk *divided* atau *separated*, yakni negara yang daratannya dipisahkan oleh perairan laut. Karena bentuknya terpisah tadi, untuk membina kekuatan bangsa ditetapkan wawasan nusantara sebagai geopolitik nasional yang memandang wilayah laut bukan sebagai pemisah daratan, tetapi pemersatu wilayah.¹⁷

Perspektif kenusantaraan Indonesia harus menjadi sebuah fondasi bagi bangsa dalam memperhatikan posisi silang strategis yang seyogyanya mengacu pada strategi pemeliharaan wilayah dari Sabang sampai Merauke khususnya untuk wilayah maritim. Emergensi kemaritiman dalam perspektif nasional, baik secara umum terkait dengan status wilayah Indonesia itu sendiri (wawasan nusantara) dan secara khusus dalam strategi pertahanan wilayah dalam kerangka diplomasi perbatasan dan peningkatan ekonomi kemaritiman. Sebuah *grand theme* kemaritiman Indonesia tidak terlepas dari proses pengakuan wilayah yang diperjuangkan melalui diplomasi pertahanan, dilema strategi pertahanan, pergeseran konsep pertahanan hingga pemeliharaan wilayah maritim dalam perspektif wawasan nusantara.

Dalam literatur hubungan internasional, masalah teritorial merupakan salah satu penyebab klasik munculnya konflik antarnegara dan menjadi ancaman konstan bagi perdamaian serta keamanan internasional. Ketidakjelasan batas teritorial, salah satunya, menjadi faktor laten penyebab munculnya sengketa perbatasan yang akan mengganggu stabilitas hubungan antarnegara. Bahkan negara-negara bertetangga yang menikmati hubungan paling bersahabat pun rentan mengalami konflik berkepanjangan jika tidak mengetahui secara persis lokasi perbatasan mereka baik darat maupun laut. Hal ini diakibatkan oleh ketidakjelasan akan menimbulkan klaim tumpang tindih teritorial yang akhirnya bermuara pada sengketa dan konflik perbatasan.

¹⁶ Chappy Hakim, *Pertahanan Indonesia: Angkatan Perang Negara Kepulauan*, (Jakarta: Red & White Publishing, 2011), hlm. 40.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 41.

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 km dan memiliki wilayah perbatasan dengan 10 negara, baik darat maupun laut, perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah negara, dimana mempunyai nilai penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, peningkatan keamanan dan keutuhan wilayah.

Letak geografis Indonesia yang berbatasan dengan 3 negara di wilayah darat dan 10 negara di wilayah laut mengharuskan Indonesia untuk menyelesaikan perjanjian perbatasan antarnegara, terutama untuk segmen-segmen perbatasan negara yang belum disepakati. Salah satu agenda utama Pemerintah Indonesia adalah memperkuat keutuhan NKRI melalui delimitasi dan demarkasi wilayah dengan negara-negara tetangga dalam konteks diplomasi perbatasan (*border diplomacy*). Kontribusi diplomasi perbatasan Indonesia tidak hanya berdampak dalam skala multilateral akan tetapi dalam kerangka bilateral.

Pada dasarnya, bentuk wilayah sangat berpengaruh dalam menyusun sistem pertahanan negara. Bentuk negara kepulauan memungkinkan Indonesia akan terjebak dalam berorientasi kepada sistem pertahanan pulau besar dan rangkaian pulau-pulau kecil. Seyogyanya Indonesia harus selalu berorientasi penuh dan fokus pada doktrin pertahanan negara maritim, yang tentunya akan sangat memerlukan kekuatan laut yang tangguh juga.¹⁸

Perubahan ke Pertahanan Maritim

Salah satu faktor penting yang harus diperhitungkan dalam pembinaan pertahanan adalah kondisi obyektif negara dan bangsa Indonesia. Faktor ini menyangkut demografi, potensi sumber alam, serta posisi geografis dengan karakter wilayah Indonesia, yang kesemuanya mempunyai arti yang sangat penting dan bahkan menentukan makna strategisnya. Faktor ini bisa dinamakan geostrategis.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 41-42.

¹⁹ Yahya A. Muhaimin, *op.cit.*, hlm. 20.

Konsep geostrategis berpendirian bahwa letak wilayah suatu negara dengan segala dimensinya, menjadi penentu kekuatan militer dan kekuatan politik negara tersebut. Penguasaan terhadap daerah yang letaknya strategis dalam percaturan dunia merupakan faktor penting supaya sebuah negara secara efektif mampu mempengaruhi, menguasai, atau mempertahankan penguasaannya terhadap wilayah lain.²⁰

Semua tahu Indonesia adalah negara maritim yang memiliki kompleksitas geografis dan sosial-budaya yang luar biasa. Fakta itu masih ditambah dengan kenyataan geopolitik lain, yaitu bahwa negara yang multi-plural ini berada pada persimpangan lalu lintas dunia, khususnya lalu lintas komunikasi maritim yang sangat penting. Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia, serta Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Di dalam kawasan itu, terdapat “daerah-daerah panas”, karena letak wilayahnya yang strategis dalam percaturan politik internasional, maupun karena kekayaan alam yang melimpah.²¹ Dalam makna geografis seperti di atas, maka kondisi obyektif Indonesia dengan kekayaan alamnya yang cukup melimpah dan dengan posisinya yang sangat strategis dalam geostrategi global, sebenarnya Indonesia bisa menempatkan dirinya sebagai “polisi lalu lintas” dalam persilangan dunia tersebut.²²

Kondisi tersebut menunjukkan betapa krusialnya wilayah kelautan kita. Belum lagi faktor ancaman yang dihadapkannya. Salah satu isu terbaru adalah soal sengketa di Laut Tiongkok Selatan yang melibatkan empat negara di kawasan (ASEAN) + Tiongkok sendiri. Jalur laut tersebut sangat penting bagi Tiongkok, selain sebagai jalur perdagangan internasional, juga untuk kepentingan militer mereka.²³ Sampai saat ini Indonesia memang belum terkena dampak langsung konflik tersebut, tetapi jika kita tidak siap, “medan perangnya” bisa saja masuk ke wilayah kedaulatan kita. Itulah pentingnya perubahan paradigma dari koter menjadi pertahanan maritim. Ancaman dari Tiongkok tersebut sangat berdimensi maritim, yang tidak bisa ditangani lewat mekanisme teritorial darat.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 21.

²¹ *Ibid.*, hlm. 22-23.

²² *Ibid.*, hlm. 23.

²³ Jerry Indrawan, “Kontroversi Pulau Buatan Tiongkok”, dalam <http://www.suarakarya.id/2015/06/27/kontroversi-pulau-buatan-tiongkok-oleh-jerry-indrawan.html>, diunduh pada 1 Juli 2015.

Selain itu, kondisi obyektif Indonesia saat ini adalah belum selesainya masalah perbatasan dan klaim wilayah laut. Berbagai konflik terbuka pun kerap muncul, termasuk kasus Laut Tiongkok Selatan di atas dan sengketa perbatasan laut dengan Singapura, Malaysia, sampai Australia. Belum tuntasnya masalah klaim tersebut mengakibatkan penegakan hukum terutama di daerah-daerah perbatasan jadi tidak jelas. Dengan perubahan pola ancaman global yang tidak lagi berasal dari negara, sebagai negara maritim masalah-masalah seperti perompakan, pencurian ikan, serta penggunaan laut untuk penyelundupan senjata dan narkoba menjadi beberapa ancaman non-konvensional yang hadir.

Atas dasar itulah, konsepsi pertahanan Indonesia harus mengalami perubahan. Sesuai dengan visi politik luar negeri Presiden Joko Widodo, Indonesia harus mampu menjadi poros maritim dunia. Berdasarkan visi polugri tersebut, cara kita memandang pertahanan harus berubah. Sistem Koter yang dijelaskan di atas sangat baik diterapkan di era Pak Harto ketika militer aktif berpolitik. Sekarang, agenda reformasi TNI mensyaratkan militer keluar dari politik dengan tidak lagi berprinsip “Dwifungsi”.²⁴

Seperti yang penulis sebutkan di awal, faktor geografis Indonesia yang adalah negara kepulauan membuat *continental based defense*, dengan berfokus pada kekuatan Angkatan Darat menjadi tidak relevan. Indonesia sudah seharusnya menggunakan paradigma pertahanan kepulauan berdasarkan doktrin *maritime based defense*. Doktrin ini menekankan pada Angkatan Laut yang kuat dengan dukungan Angkatan Udara yang kuat juga. *Maritime based defense* harus mengkolaborasikan kekuatan Angkatan Laut dengan Angkatan Udara karena faktor geografis negara kepulauan membutuhkan respons cepat yang tidak mungkin dilakukan lewat darat.

Dalam operasi militer bantuan udara juga sangat penting, apalagi untuk negara kepulauan seperti Indonesia. Angkatan Udara beroperasi secara taktis untuk memberikan bantuan bagi pasukan yang ada di darat maupun di laut. Bantuan yang diberikan dapat berbentuk pengintaian terhadap kedudukan musuh, mengarahkan atau memberikan bantuan tembakan, angkutan pasukan, perlengkapan, dan berbagai dukungan logistik lainnya. Dalam tingkatan strategis dapat berbentuk pertempuran udara antar pesawat

²⁴ Yuddy Chrisnandi, *Reformasi TNI: Perspektif Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2005), hlm. 11.

tempur, pengeboman terhadap berbagai obyek vital musuh dan penghancuran sistem komunikasi musuh.²⁵

Dalam fit and proper test di Komisi I DPR RI, calon Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa fokus kekuatan pertahanan kita akan diberatkan pada Angkatan Laut dan Udara sesuai visi dan misi Presiden Joko Widodo.²⁶ Kita harus mengubah adagium, “kalau musuh menyerang mereka mungkin bisa menang di laut dan udara, tapi di darat nanti dulu”. Konsep peperangan modern tidak bisa bergaya “jagoan” seperti itu. Diperlukan perencanaan strategi yang bersifat *inward*, yaitu faktor alam, kekuatan militer nasional, teknologi, dan lain-lain, serta *outward*, yaitu kemampuan dan strategi musuh. Diperlukan sinergi antara tiga matra kita dalam menghadapi ancaman musuh.

Doktrin “menunggu di darat” sesungguhnya tidak terlalu tepat diterapkan pada masa kini bila dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia, dan lebih-lebih dihadapkan dengan semakin canggihnya kemajuan teknologi militer. Sebagai negara kepulauan yang terbuka, postur angkatan laut dan angkatan udara yang tangguh sebagai garda terdepan sudah seharusnya merupakan hal yang mutlak dimiliki. Musuh harus dihancurkan sebelum mencapai daratan, bahkan bila perlu dihancurkan saat masih berada di wilayah mereka (*pre-emptive strike*).²⁷

Penulis pun mengkritisi konsep perang gerilya yang termasuk dalam doktrin pertahanan koter, apabila diterapkan di era “*fourth generation warfare*” seperti sekarang ini. Strategi ini memerlukan partisipasi dari segenap komponen bangsa, tidak hanya militer. Akan tetapi, selama ini untuk menghadapi ancaman militer (konvensional), sipil tidak pernah dilibatkan.

Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara memang menyebutkan soal komponen pendukung dan komponen cadangan, di luar komponen utama pertahanan Indonesia (TNI), tetapi sampai saat ini aturan yang mengatur lebih

²⁵ Chappy Hakim, *Pelangi Dirgantara*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 140.

²⁶ CNN Indonesia, “Mewujudkan Mimpi RI Jadi Poros Maritim Dunia”, dalam <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141022124012-112-7389/mewujudkan-mimpi-ri-jadi-poros-maritim-dunia/>, diunduh pada tanggal 6 Juli 2015.

²⁷ Chappy Hakim, *op cit.*, hlm. 119.

jelas mengenai keterlibatan sipil dalam urusan pertahanan negara, yaitu RUU Komponen Cadangan, masih dalam pembahasan di DPR. Menurut penulis, ini bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 30 ayat 1, dimana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara. Realita ini juga menandakan rapuhnya sistem koter, karena dalam konsep perang gerilya, kesatuan militer harus menyatu dengan rakyat, seperti yang penulis sebutkan di bagian terdahulu.

Di negara-negara maju, sinergi antara Angkatan Laut dan Angkatan Udara dibutuhkan sebagai *first and second line of defense*. Tidak ada Angkatan Laut yang kuat tanpa dukungan udara. Dalam perspektif penangkalan ancaman bagi negara yang berbasis kepulauan, yang dikirim pertama kali untuk menghadapi musuh adalah Angkatan Udara (*first line*). Jet-jet tempur tersebut harus diluncurkan dari kapal induk Angkatan Laut, bukan dari pangkalan di darat. Setelah mengirimkan pesawat tempur, armada Angkatan Laut bersiap di laut sebagai kekuatan pemukul atau berjaga melindungi wilayah kepulauan kita (*second line*).

Dalam mengorganisasikan pertahanan laut, TNI Angkatan Laut mengedepankan tiga pilar, yaitu:

1. Melakukan upaya penangkalan sejak di pangkalan.
2. Menghancurkan musuh di luar batas wilayah laut nasional, yakni di daerah:
 - a. Medan Pertahanan Penyanggah yang berada di luar garis batas ZEE Indonesia dan lapisan udara di atasnya.
 - b. Medan Pertahanan Utama, sejak dari batas luar laut teritorial sampai dengan ZEE Indonesia dan lapisan udara di atasnya.
 - c. Medan Perlawanan, yakni daerah laut teritorial dan perairan kepulauan dan lapisan udara di atasnya.
3. Bila musuh tetap tidak terbendung, maka mereka akan dihancurkan di daratan sesuai doktrin Sishanta.²⁸

²⁸ *Ibid.*, hlm. 121.

Konsep ini disusun dengan mengedepankan konsep strategi pertahanan berlapis (*layered defence strategy*), yaitu konsep pertahanan yang bertumpu pada keterpaduan antara lapis pertahanan militer dan lapis pertahanan non-militer (sipil), dengan tujuan mengatasi dan menanggulangi ancaman militer dan non-militer, serta untuk tujuan menghadapi perang berlarut. Keterlibatan sipil sangat dibutuhkan dalam hal ini.

Tentu, bila kedua upaya penangkalan dan pertahanan berlapis itu gagal dan jebol maka barulah diperlukan pertahanan darat sebagai komponen sistem pertahanan rakyat semesta. Akan tetapi, sebisa mungkin pertempuran jangan sampai terjadi di darat, atau di “pekarangan belakang” kita sendiri. *Civilian casualty* akan sangat banyak bila itu terjadi, serta definisi kombatan sendiri menjadi tidak jelas dalam perang semesta seperti itu. Sekalipun terminologi kombatan adalah apa pun yang merepresentasikan target militer dan sah untuk terlibat dalam pertempuran, akan sulit membedakan antara kombatan dengan non-kombatan jika hal itu terjadi.²⁹ Sekali lagi, sipil terlibat tidak dalam perang terbuka, tetapi sebagai komponen pendukung.

Hal senada dikatakan Yahya Muhaimin bahwa dalam konteks *preventive defense*, maka Angkatan Laut dan Angkatan Udara merupakan ujung tombak guna mencegah infiltrasi dan subversi kekuatan militer dari luar negeri. Dua kekuatan itu adalah yang paling tepat memikul tanggung jawab untuk mencegah kekuatan dari luar negeri agar tidak memasuki wilayah Indonesia. Sementara itu, Angkatan Darat akan memelihara keamanan nasional, bersama Polri.³⁰

Untuk bisa menerapkan strategi demikian, Angkatan Laut kita harus memiliki kekuatan setidaknya setara dengan *green water navy*. Maksudnya, Angkatan Laut kita harus memiliki armada kapal yang mampu beroperasi dan menjangkau wilayah kelautannya (wilayah ZEE) sendiri dengan cepat, serta juga memiliki kemampuan beroperasi di laut lepas di sekitar wilayah negaranya sendiri.³¹ Sebaiknya Angkatan Laut kita memiliki kemampuan setara *blue water navy*, yaitu kekuatan Angkatan Laut yang beroperasi lintas samudera di laut lepas, jauh melebihi wilayah ZEE-nya sendiri. Angkatan

²⁹ Jerry Indrawan, “Status Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta (Private Military and Security Companies) dalam Hukum Humaniter Internasional”, *Jurnal Pertahanan*, Vol. 4, No. 1, 2014, hlm. 127.

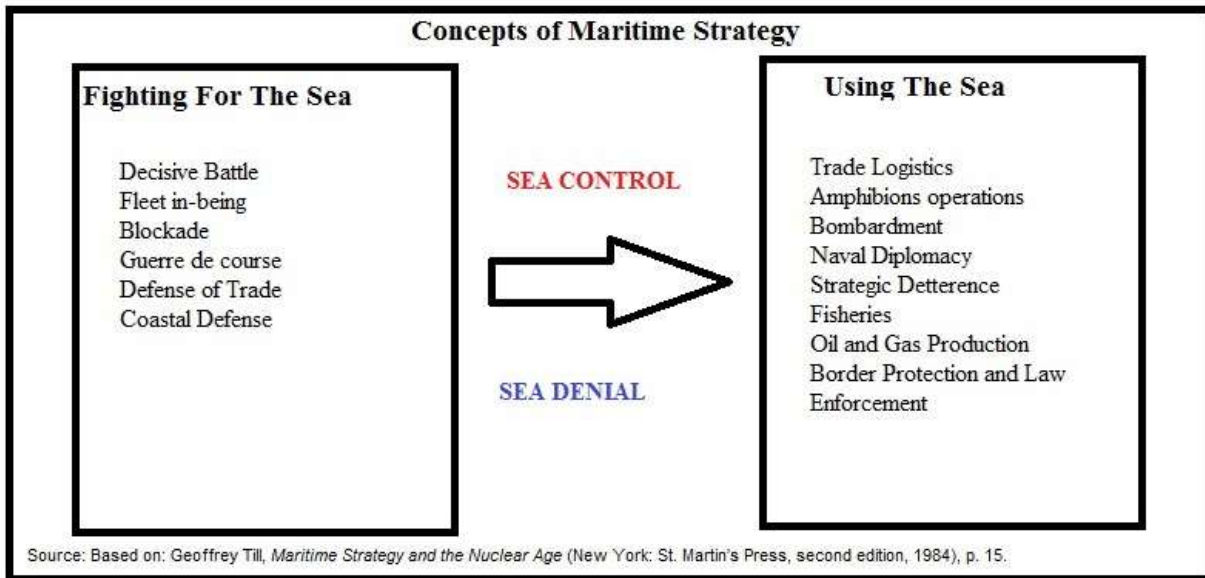
³⁰ Muhaimin. *op cit.*, hlm. 63.

³¹ Patrick C. Bratton, *Sea Power and the Asia-Pacific: the Triumph of Neptune?*, (London: Routledge, 2012), hlm. 54.

Laut jenis ini harus memiliki armada laut dengan kemampuan maritim eksploratif.³² Sedangkan, Angkatan Darat digunakan sebagai *last line of defense* yang bertujuan menjaga lokasi-lokasi strategis negara, serta melindungi rakyat sipil yang ada di daratan.

Konsep *maritime based defense* ini bisa kita lihat dalam bagan berikut:

Gambar 1. Konsep Strategi Maritim



Sumber: Geoffrey Till, *Maritime Strategy and the Nuclear Age*, (New York: St. Martin's Press, 1984)

Inilah pentingnya pembangunan kekuatan Angkatan Laut. Negara dengan wilayah seluas Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan lima pulau besar (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) membutuhkan perhatian lebih di sektor pertahanan dan keamanan. Jika memang terjadi perang, peperangan itu akan terjadi di laut, bukan di darat dengan warga sipil jadi taruhannya. Laut pun tidak hanya digunakan untuk pertahanan dan keamanan. Seperti visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia poros maritim dunia, laut Indonesia akan diprioritaskan juga untuk perdagangan jalur laut, perikanan, maupun pemanfaatan sumber daya alam yang ada di laut.

Menurut Yahya Muhaimin, kemampuan pertahanan Indonesia harus ditujukan untuk dan sesuai dengan keunikan posisi geografis Indonesia, sebagaimana juga yang

³² Ian Speller, "Delayed Reaction: UK Maritime Expeditionary Capabilities and the Lesson of the Falklands Conflict", *Journal of Defense and Security Analysis*, Vol. 18, No.4, 2002, hlm. 374.

telah disinggung penulis di bagian awal. Di samping sebagai negara maritim dengan masyarakat yang multi-plural, Indonesia juga meliputi wilayah pertahanan yang tersebar begitu luas. Karena itu, kemampuannya harus dibina secara merata dengan proporsi yang tepat, baik kekuatan laut, udara, maupun darat, di samping membina kekuatan pemelihara ketertiban umum (Polri) secara memadai. Sinergi kekuatan gabungan yang handal dan siap tempur tersebut sangat krusial guna mendapat pembinaan secara terencana dan berkesinambungan. Hal yang biasa disebut dengan “*military preparedness*” (kesiapsiagaan TNI) ini, bersama dengan kekuatan kepolisian, merupakan unsur penting bagi kekuatan suatu bangsa (*national power*).³³

Terakhir, menarik untuk mencermati pandangan mantan Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI, Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo terkait komando teritorial. Menurut Salim Said, yang mengutip pandangan Agus Widjojo tersebut dalam bukunya, ia cenderung berpendapat untuk mempertahankan koter seperti yang ada sekarang, tetapi fungsi pembinaannya dilakukan lewat pemerintah daerah sebagai aparat yang sangat memahami daerahnya. Karena aparat teritorial tidak lagi menjangkau ke dalam masyarakat, maka Komando Distrik Militer (Kodim), Komando Rayon Militer (Koramil), dan Bintara Pembina Desa (Babinsa), yang selama ini bersentuhan dengan masyarakat, dengan sendirinya akan hilang. Selain itu, untuk menghindari campur tangan tentara ke urusan-urusan pemerintahan, markas kodam sebaiknya tidak diletakkan di kota yang sama dengan kantor Gubernur.³⁴

Agus mengusulkan agar setiap kodam bertanggungjawab mempertahankan wilayahnya, tetapi dilakukan dalam payung pertahanan bersama wilayah tertentu yang berada di bawah pimpinan seorang Panglima Mandala yang bersifat gabungan. Karena gabungan, maka kodam-kodam itu pun nantinya bersifat gabungan sesuai dengan corak daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Daerah maritim cocoknya maritim, daerah Angkatan Udara bercorak dirgantara, daerah darat bercorak Angkatan Darat. Komando Mandala bukan aparat teritorial, tetapi tugasnya bertanggung jawab mempertahankan

³³ Muhaimin. *op.cit.*, hlm. 62.

³⁴ Said., *op cit.*, hlm. 311.

mandalanya secara mobil dan teritorial dengan bertumpu pada kodam-kodam yang dibawahinya.³⁵

Proyeksi Kekuatan Maritim Indonesia

Perubahan paradigma dari koter ke pertahanan maritim juga membutuhkan transformasi postur pertahanan Indonesia melalui strategi pengembangan kekuatan maritim regional di kawasan Asia Timur. Untuk menjadi “*sea power*”, suatu negara harus memenuhi dua kriteria. Pertama, adanya anggaran belanja Angkatan Laut yang signifikan, setidaknya sama dengan 50% total anggaran belanja di suatu kawasan. Kedua, anggaran tersebut menjelma menjadi kapal perang yang setidaknya sama dengan 50% total kapal perang di Asia Timur.³⁶ Saat ini, Angkatan Laut Indonesia baru memiliki 171 unit kapal, yang terdiri dari 6 kapal fregat, 26 kapal korvet, 21 kapal patroli, 12 kapal penyapu ranjau, dan 2 kapal selam.³⁷ Jumlah tersebut jauh dari ideal.

Kemampuan anggaran dan kekuatan maritim seperti itu juga harus disertai dengan kemampuan proyeksi kekuatan dan struktur kekuatan maritim. Kemampuan proyeksi kekuatan yang harus dimiliki oleh suatu “*sea power*” adalah pertama, fungsi-fungsi maritim masa damai. Fungsi-fungsi ini dioperasionalkan menjadi perlindungan *sea lanes of communications*, jaminan lintas damai, dan kemampuan evakuasi kecelakaan laut. Kedua, *battlespace dominance* dengan mengembangkan tiga sistem pertahanan: *sea-denial system*, *space-denial system*, dan *land-space denial system*. Ketiga, demonstrasi kekuatan untuk menghentikan dan menghancurkan kekuatan darat lawan, melumpuhkan pusat komando lawan, dan melumpuhkan fasilitas pelabuhan laut dan bandara udara lawan. Struktur kekuatan maritim maksimal yang harus dikembangkan untuk melakukan proyeksi kekuatan tersebut terdiri dari lima armada, yaitu *aircraft carrier battlegroup*, *theater and missile defense group*, *theater land attack group*, *mine countermeasures group*, dan *expeditionary littoral attack group*.³⁸

³⁵ *Ibid.*, hlm. 312.

³⁶ Andi Widjajanto, “Rekonstruksi Gelar Pertahanan Indonesia”, dalam Rusdi Marpaung, dkk (ed), *Dinamika Reformasi Sektor Keamanan*, (Jakarta: Imparsial, 2005), hlm. 197.

³⁷ Kompas, “Industri Pertahanan Dalam Negeri”, 2 Juli 2015, hlm. 1.

³⁸ Widjajanto, *op cit.*, hlm. 198.

Menarik juga untuk mencermati pandangan mantan Menhan, Juwono Sudarsono, terkait perubahan paradigma ke arah pertahanan maritim. Perkiraan tentang sumber dan sifat ancaman, serta lingkungan strategis yang dihadapi bangsa dalam kurun waktu 5-10 tahun mendatang. Ia menyarankan untuk dibuat komando gabungan dan operasi gabungan (*joint command and joint operations*) darat, laut, dan udara sehingga tercapai daya tahan dan daya tangkal yang efektif, dengan memanfaatkan geopolitik dan geoekonomi Indonesia di Asia Pasifik.³⁹

Selain itu, konsep pertahanan militer konvensional harus dipadukan dengan pertahanan non-militer. Pertahanan non-militer ini memanfaatkan kemajuan cepat di bidang teknologi dan komputerisasi yang bisa digunakan untuk kepentingan pertahanan maritim kita.⁴⁰ Militer tidak boleh malu belajar dari sipil. Baru-baru ini, Menhan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa akan menggunakan *drone* (pesawat tanpa awak) yang biasa digunakan di sektor swasta (sipil) untuk kepentingan pertahanan. *Drone* sipil tadi akan dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan militer.

Terlepas dari pergeseran paradigma dalam melihat konsep pertahanan, harus dibawahi bahwa pengadaan alutsista tetap menjadi *grand design* penentu keberhasilan sebuah strategi pertahanan. Apalagi dalam menyokong pertahanan maritim, alutsista yang kuat dan mandiri menjadi sebuah keharusan bagi sistem pertahanan sebuah negara. Alutsista yang mumpuni juga dapat menjadi sebuah *defensive diplomacy* dalam kerangka pertahanan Indonesia ke luar.

Menurut pengamat pertahanan Muradi, langkah pengadaan alutsista dengan program *Minimum Essential Forces* (MEF) jangan terjebak dengan target pemenuhan kuantitatif, dalam arti sebaran dan jumlah. Selama ini, pengadaan alutsista lewat skema hibah hanya mengejar kuantitas tanpa memperhatikan kualitas dan kemampuan dalam mengamankan kedaulatan Indonesia. Panglima TNI harus menjadikan modernisasi alutsista sebagai pekerjaan rumah yang serius. Kemhan juga harus menolak skema hibah. Terlebih, sejak awal Presiden Joko Widodo telah berkomitmen untuk menyokong

³⁹ Juwono Sudarsono, "Pertahanan dan Keamanan: Masalah Bersama Kita", dalam Indria Samego (ed), *Sistem Pertahanan-Kepentingan Negara: Analisis Potensi dan Problem*, (Jakarta: The Habibie Center, 2001), hlm. 40.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 39.

pengembangan dan modernisasi pertahanan sebagai bagian dari penguatan poros maritim. Karena itu, amat baik jika mengombinasikan produk industri pertahanan dalam negeri serta pengadaan alutsista dalam skema pembelian baru dan langsung G to G agar dapat terjadi alih teknologi yang memperkuat basis industri pertahanan ke depan.⁴¹

Wilayah Indonesia yang demikian luasnya membutuhkan sebuah sistem pertahanan yang kuat dan mumpuni, bukan saja sebagai sebuah *external defense capability building* namun juga pemeliharaan *internal security capacity building*. Pertahanan maritim harus dimulai dari sebuah sistem pertahanan yang baik dalam manajemen wilayah perbatasan dan manajemen sumber daya kelautan. Sejumlah konsep dan relevansi paradigma ini tercermin dalam pemeliharaan wilayah maritim (termasuk perbatasan laut dan darat) dan pengadaan alutsista Indonesia.

Perubahan paradigma dari pertahanan darat ke laut sebenarnya sudah mulai terlihat, dimana pembangunan sistem pertahanan yang modern berbasis alutsista yang canggih dan handal. Dengan pengadaan belanja alutsista kapal perang berbagai jenis, perulu kendali, kapal selam, pesawat patroli maritim, helikopter anti kapal selam serta memperkuat satuan-satuan angkatan laut di pulau-pulau terluar serta gencar melakukan patroli perbatasan laut. Pengadaan alutsista yang mengutamakan produk-produk buatan anak bangsa juga dilakukan dengan banyaknya pengadaan alutsista angkatan laut buatan dalam negeri, baik dibuat oleh BUMN maupun perusahaan swasta.⁴²

Terakhir, kita patut mengapresiasi keinginan para pemangku kepentingan di bidang pertahanan untuk tidak lagi mendatangkan alutsista bekas atau hibah. Menurut Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, pengadaan senjata baru non-hibah sudah menjadi arah Renstra TNI (MEF Tahap I) 2010-2014. Setelah kebijakan pengadaan alutsista bekas berkali-kali berujung kecelakaan, evaluasi mutlak diperlukan. Kunci modernisasi persenjataan ada pada komitmen pemerintah untuk merealisasikan anggaran memadai.⁴³

Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang juga calon Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berjanji akan melakukan perombakan mendasar terhadap sistem manajemen

⁴¹ Koran Sindo, "Alutsista TNI Harus Diaudit Total", 1 Juli 2015, hlm. 3.

⁴² Hariyanto Kadir, "Tameng Negara Kepulauan! Jelas di Laut", dalam <http://lautindonesia.com/tameng-negara-kepulauan-jelas-di-laut/>, diunduh pada 8 Juli 2015.

⁴³ Kompas, "RI Tak Lagi Beli Persenjataan Bekas", 6 Juli 2015, hlm. 1.

alutsista dan penguatan *zero accident*. Terkait modernisasi sistem persenjataan, Gatot menyatakan, pengadaannya ke depan harus baru semua. Selain itu, sesuai arahan presiden, pengadaan sistem persenjataan juga harus melibatkan industri pertahanan domestik.⁴⁴ Sekarang, kita tinggal menunggu langkah konkrit Presiden Joko Widodo dalam upayanya membangun poros maritim dunia abad XXI. Perubahan paradigma pertahanan tentunya menjadi salah satu yang harus dilakukan.

Kesimpulan

Pada dasarnya, bentuk wilayah sangat berpengaruh dalam menyusun sistem pertahanan negara. Bentuk negara kepulauan memungkinkan Indonesia akan terjebak dalam berorientasi kepada sistem pertahanan pulau besar dan rangkaian pulau-pulau kecil. Seyogyanya Indonesia harus selalu berorientasi penuh dan fokus pada doktrin pertahanan negara maritim, yang tentunya akan sangat memerlukan kekuatan laut yang tangguh juga. Konsep geostrategis juga berpendirian bahwa letak wilayah suatu negara dengan segala dimensinya, menjadi penentu kekuatan militer dan kekuatan politik negara tersebut.

Atas dasar itulah, konsepsi pertahanan Indonesia harus mengalami perubahan. Sesuai dengan visi politik luar negeri Presiden Joko Widodo, Indonesia harus mampu menjadi poros maritim dunia. Berdasarkan visi polugri tersebut, cara kita memandang pertahanan harus berubah. Di negara-negara maju, sinergi antara Angkatan Laut dan Angkatan Udara dibutuhkan sebagai *first and second line of defense*. Tidak ada Angkatan Laut yang kuat tanpa dukungan udara. Dalam perspektif penangkalan ancaman bagi negara yang berbasis kepulauan, yang dikirim pertama kali untuk menghadapi musuh adalah Angkatan Udara (*first line*). Jet-jet tempur tersebut harus diluncurkan dari kapal induk Angkatan Laut, bukan dari pangkalan di darat. Setelah mengirimkan pesawat tempur, armada Angkatan Laut bersiap di laut sebagai kekuatan pemukul atau sekadar berjaga melindungi wilayah kepulauan kita (*second line*).

Konsep ini disusun dengan mengedepankan konsep strategi pertahanan berlapis (*layered defence strategy*), yaitu konsep pertahanan yang bertumpu pada keterpaduan

⁴⁴ *Ibid.*

antara lapis pertahanan militer dan lapis pertahanan non-militer (sipil) dengan tujuan mengatasi dan menanggulangi ancaman militer dan non-militer, serta untuk tujuan menghadapi perang berlarut.

Untuk bisa menerapkan strategi demikian, Angkatan Laut kita harus memiliki kekuatan setidaknya setara dengan *green water navy*. Maksudnya, Angkatan Laut kita harus memiliki armada kapal yang mampu beroperasi dan menjangkau wilayah kelautannya (wilayah ZEE) sendiri dengan cepat, serta juga memiliki kemampuan beroperasi di laut lepas di sekitar wilayah negaranya sendiri. Baiknya memang Angkatan Laut kita memiliki kemampuan setara *blue water navy*, yaitu kekuatan Angkatan Laut yang beroperasi lintas samudera di laut lepas, jauh melebihi wilayah ZEE-nya sendiri. Angkatan Laut jenis ini harus memiliki armada laut dengan kemampuan maritim eksploratif.

Inilah pentingnya pembangunan kekuatan Angkatan Laut. Negara dengan wilayah seluas Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan lima pulau besar (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) membutuhkan perhatian lebih di sektor pertahanan dan keamanan. Jika memang terjadi perang, peperangan itu akan terjadi di laut, bukan di darat dengan warga sipil jadi taruhannya. Laut pun tidak hanya digunakan untuk pertahanan dan keamanan. Seperti visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia poros maritim dunia, laut Indonesia akan diprioritaskan juga untuk perdagangan jalur laut, perikanan, maupun pemanfaatan sumber daya alam yang ada di laut.

Daftar Pustaka

Buku

- Anggoro, Kurnanto. 2005. "Paradigma Keamanan Nasional dan Pertahanan Negara di negara Demokrasi", dalam Rusdi Marpaung, dkk (ed). *Dinamika Reformasi Sektor Keamanan*. Jakarta: Imparsial.
- Bratton, Patrick C. 2012. *Sea Power and the Asia-Pasific: the Triumph of Neptune?* London: Routledge.
- Chrisnandi, Yuddy. 2005. *Reformasi TNI: Perspektif Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Hakim, Chappy. 2010. *Pelangi Dirgantara*. Jakarta: Kompas.
- , 2011. *Pertahanan Indonesia: Angkatan Perang Negara Kepulauan*. Jakarta: Red & White Publishing.
- Holsti, Kalevi J. 1981. *International Politics: A Framework of Analysis*. New Delhi: Prentice Hall.
- Muhaimin, Yahya A. 2008. *Bambu Runcing dan Mesiu: Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Muradi. 2012. *Dinamika Politik Pertahanan dan Keamanan di Indonesia: Memahami Masalah dan Kebijakan Politik Pertahanan dan Keamanan Era Reformasi*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Said, Salim. 2001. *Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini dan Kelak*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sudarsono, Juwono. 2001. "Pertahanan dan Keamanan: Masalah Bersama Kita", dalam Indria Samego (ed). *Sistem Pertahanan-Keamanan Negara: Analisis Potensi dan Problem*. Jakarta: The Habibie Center.
- Sukadis, Beni dan Eric Hendra (ed). 2008. *Total Defense and Military Conscript: Indonesia's Experience and Other Democracies*. Jakarta: Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia.
- Widjajanto, Andi. 2005. "Rekonstruksi Gelar Pertahanan Indonesia", dalam Rusdi Marpaung, dkk (ed), *Dinamika Reformasi Sektor Keamanan*. Jakarta: Imparsial.
- Widjojo, Agus. 2001. "Wawasan Masa Depan tentang Sistem Pertahanan Keamanan Negara", dalam Indria Samego (ed). *Sistem Pertahanan-Keamanan Negara: Analisis Potensi dan Problem*. Jakarta: The Habibie Center.

Jurnal

- Indrawan, Jerry. 2015. "Kepemimpinan Berbasis Pemberdayaan dalam Alih Teknologi: Sebuah Upaya Meningkatkan Kualitas SDM Pertahanan Indonesia". *Jurnal Pertahanan*. Vol. 5. No. 1.
- , 2014. "Status Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta (Private Military and Security Companies) dalam Hukum Humaniter Internasional". *Jurnal Pertahanan*. Vol. 4. No. 1.
- Speller, Ian. 2002. "Delayed Reaction: UK Maritime Expeditionary Capabilities and the Lesson of the Falklands Conflict". *Journal of Defense and Security Analysis*. Vol 18. 4.

Surat Kabar

- Kompas, "Industri Pertahanan Dalam Negeri", 2 Juli 2015.
- Kompas, "RI Tak Lagi Beli Persenjataan Bekas", 6 Juli 2015.
- Koran Sindo, "Alutsista TNI Harus Diaudit Total", 1 Juli 2015.

Website

CNN Indonesia, “Mewujudkan Mimpi RI Jadi Poros Maritim Dunia”, dalam <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141022124012-112-7389/mewujudkan-mimpi-ri-jadi-poros-maritim-dunia/>, diunduh pada 6 Juli 2015.

Indrawan, Jerry, “Kontroversi Pulau Buatan Tiongkok”, dalam <http://www.suarakarya.id/2015/06/27/kontroversi-pulau-buatan-tiongkok-oleh-jerry-indrawan.html>, 27 Juni 2015, diunduh pada 1 Juli 2015.

Kadir, Hariyanto, “Tameng Negara Kepulauan! Jelas di Laut”, dalam <http://lautindonesia.com/tameng-negara-kepulauan-jelas-di-laut/>, diunduh 8 Juli 2015.